

## TANTANGAN DAN STRATEGI KOPERASI DALAM MENERAPKAN ISO 26000 UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

**Muhammad Rusli<sup>1\*</sup>**

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, [muhammad122012006053@std.trisakti.ac.id](mailto:muhammad122012006053@std.trisakti.ac.id)

\*Corresponding author

**Kurniawati<sup>2</sup>**

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. [kurniawati@trisakti.ac.id](mailto:kurniawati@trisakti.ac.id)

**Maria Ariesta Utha<sup>3</sup>**

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. [maria.utha@trisakti.ac.id](mailto:maria.utha@trisakti.ac.id)

### Abstract

**Background** – Family is a key factor in creating quality resources to support successful development. One of the family's responsibilities in improving the economy is to form a business group to generate additional income for the family. The problem that is often faced by family businesses and small businesses is the lack of sources of capital and knowledge to run their businesses so that they can develop and expand their marketing. stated that there is a need for a forum to improve the quality of human resources in small businesses. One of the most effective and efficient forums is the formation of cooperatives.

**Objective** – To analyze and evaluate the challenges and strategies of savings and loan cooperatives in implementing ISO 26000 for sustainable economic development, so as to improve the economy of the surrounding community or certain areas.

**Design / methodology / approach** – This study uses an approach to analyze the role of Savings and Loans Financial Institutions in good governance in terms of the implementation of ISO 26000 and the issues and strategies applied. The subject of this research is the Savings and Loans Financial Institution. The survey respondents interviewed the directors of financial institutions and operational managers and financial managers as well as stakeholders in savings and loan financial institutions. This study was analyzed using content analysis.

**Findings** – With these challenges and strategies, it is hoped that Savings and Loans Financial Institutions can carry out sustainable economic development (SDGs) as in point 1 and point 8 and point 9 and point 17, namely: a) SDGs No. 1 concerning Poverty Alleviation: Encouraging economic activity in rural areas and regions to reduce poverty, b) SDGs No. 8 on Decent Work and Economic Growth: Encouraging participation among low-income families for decent work and growing the economy, c) SDGs No. 9 on Reducing Inequalities: Strengthening the social capital of the rural population to reduce inequality in the community, d) SDGs No 17 concerning Partnerships to Achieve Goals: Strengthen the social capital of rural residents for partnerships that can grow family businesses so that the goals of economic growth are achieved.

**Conclusion** - It is hoped that there are challenges and strategies that savings and loan financial institutions can carry out sustainable economic development (SDGs) as in point 1 and point 8 and point 9 and point 17.

**Diterima** : 28 November 2022

**Direview** : 13 Desember 2022

**Direvisi** : 25 Januari 2023

**Disetujui** : 30 Januari 2023



**Research implication** – *To improve innovation performance, cooperatives must be more proactive in responding to various issues related to changes in the cooperative environment both internally and externally. These changes must be responded to wisely through research and development activities so that cooperatives can maintain their existence in the future. One thing that needs attention is related to governance in the implementation of ISO 26000. To carry out cooperative responsibilities in terms of managing management, cooperatives must become more innovative both in product development, more effective and efficient work procedures, controlled resource utilization, as well as the use of appropriate technology.*

**Limitations** – *This study only covers all the ISO 2600 standard topics related to organizational governance, human rights, labor practices, environment, fair practices, consumer issues and community participation and development in savings and loan institutions. And the extent to which the management of the Savings and Loans Institution for Sustainable Economic Growth (SDG) has implemented aspects of the ISO 26000 standard.*

**Keywords:** *Challenges, Strategies, Cooperatives, ISO 26000, Sustainable, Development.*

### Abstrak

**Latar Belakang** - Keluarga merupakan faktor kunci dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan perkembangan. Salah satu tanggung jawab keluarga dalam meningkatkan perekonomian adalah membentuk kelompok usaha untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Masalah yang sering dihadapi oleh usaha keluarga dan usaha kecil adalah kurangnya sumber modal dan pengetahuan untuk menjalankan usahanya sehingga dapat mengembangkan dan memperluas pemasarannya bahwa untuk itu diperlukan wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usaha kecil. Salah satu forum yang paling efektif dan efisien adalah pembentukan Lembaga keuangan Simpan Pinjam.

**Tujuan** - Untuk menganalisa dan mengevaluasi tantangan dan strategi Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dalam mengimplementasikan ISO 26000 guna untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar atau daerah tertentu.

**Desain / metodologi / pendekatan** - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dalam good governance dilihat dari penerapan ISO 26000 serta isu dan strategi yang diterapkan. Subyek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Responden survei adalah mewawancarai Direktur Lembaga keuangan dan Manager Operasional dan Manager Keuangan serta stakeholders di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis konten.

**Hasil dan Pembahasan** – Dengan adanya tantangan dan strategi diharapkan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam bisa melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (SDGs) seperti pada point 1 dan poin 8 dan poin 9 dan poin 17 yaitu: a) SDGs No 1 tentang Pengentasan kemiskinan : Mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan dan daerah tersebut untuk mengentaskan kemiskinan, b) SDGs No 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Mendorong partisipasi di kalangan keluarga berpenghasilan rendah untuk pekerjaan yang layak dan menumbuhkan perekonomian, c) SDGs No 9 tentang Berkurangnya Kesenjangan : Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan untuk bertujuan berkurangnya kesenjangan di masyarakat, d) SDGs No 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan untuk kemitraan yang bisa menumbuhkan bisnis keluarga agar tujuan pertumbuhan ekonomi tercapai.

**Kesimpulan** - Adanya tantangan dan strategi diharapkan Lembaga Keuangan simpan pinjam bisa melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (SDGs) seperti pada point 1 dan poin 8 dan poin 9 dan poin 17.

**Implikasi Penelitian** - Untuk meningkatkan kinerja inovasi, koperasi harus lebih proaktif dalam menanggapi berbagai isu terkait adanya perubahan lingkungan koperasi baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut harus ditanggapi secara bijak melalui kegiatan research and development agar koperasi dapat mempertahankan eksistensinya di kemudian hari. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan tata kelola dalam pelaksanaan ISO 26000. Untuk menjalankan tanggung jawab koperasi dalam hal Kelola manajemen, Koperasi harus menjadi lebih inovatif baik dalam pengembangan produk, tata cara kerja yang lebih efektif dan efisien, utilisasi sumber daya yang terkontrol, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

**Batasan Penelitian** - Studi ini hanya mencakup semua topik standar ISO 2600 yang terkait dengan tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik yang adil, masalah konsumen dan partisipasi dan pengembangan masyarakat dalam Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Dan sejauh mana manajemen Lembaga Keuangan Simpan Pinjam untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan (SDG) telah menerapkan aspek standar ISO 26000.

**Kata Kunci:** Tantangan, Strategi, Koperasi, ISO 26000, Sustainable, Development.

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan faktor kunci dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan pembangunan (Cabrera-Suarez, 2001). Salah satu peran keluarga dalam meningkatkan perekonomian adalah membentuk kelompok usaha untuk menghasilkan tambahan pendapatan bagi keluarga (Morck dan Young, 2003). Masalah yang sering dihadapi bisnis keluarga dan usaha kecil adalah kurangnya modal dan pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan pemasaran mereka. (Luo dan Shen, 2009) menyatakan bahwa oleh karena itu diperlukan suatu forum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan kecil. Salah satu forum yang paling efektif dan efisien adalah pembentukan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Lembaga Keuangan Simpan Pinjam adalah tempat di mana dana masyarakat

(anggota) dapat dikumpulkan dan didistribusikan, dan dana tersebut dapat membantu usaha kecil memulai bisnis atau mengembangkan bisnis mereka (Birchall dan Ketilson, 2009).

Salah satu keuntungan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam adalah kesejahteraan anggotanya. Dengan kata lain, seiring berkembangnya Lembaga Keuangan Simpan Pinjam, maka keuntungan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam juga akan dibagi di antara para anggotanya (Thomas, 2004). Mojo et al., (2017) Penduduk desa harus didorong untuk membentuk Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dan terlibat dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Karena jika ditangani dengan benar, akan berdampak positif bagi semua anggota. Battilana, (2018) keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di garda depan perkembangan usaha merupakan



fenomena nyata yang tidak dapat ditanggapi oleh badan hukum atau badan sejenis lainnya. Kehadiran Lembaga Keuangan diharapkan mampu mengimbangi pilar ekonomi lainnya (BUMN dan swasta). Lembaga Keuangan Simpan Pinjam sangat selaras dengan budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia karena menggabungkan prinsip Gotong Royong, Gotong Royong untuk kesejahteraan bersama (Gotong Royong) dan beberapa esensi moral lainnya (Suryanti et al., 2021). Wahyuningtyas et al., (2022), Indonesia memiliki jumlah Lembaga Keuangan Simpan Pinjam terbanyak di dunia dengan 127.124 unit. Jika dikelola dengan baik, seperti di Denmark, kontribusinya bisa mencapai produk domestik bruto (PDB). Karena banyak Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di Indonesia yang tidak aktif karena tidak dikelola dengan baik dan bergantung pada dana negara (Hamada, 2010). Bretos et al., (2020), fenomena ini menjelaskan mengapa peningkatan volume Lembaga Keuangan Simpan Pinjam tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan banyak Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang pasif. Salah satu kendalanya adalah anggota tidak berpartisipasi dalam kehidupan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam.

Partisipasi anggota sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam (Özgül

et al., 2020). Notaris Dewi Tenty Septi Artiany dari Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (MEME) melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Lembaga Keuangan Simpan Pinjam masih sekitar 4,4% menurut data tahun 2016. "Indonesia memiliki Lembaga Keuangan Simpan Pinjam terbanyak di dunia, tetapi jumlahnya tidak ada kaitannya dengan tingkat pendapatan, dan bagian terbesar dari pendapatan simpan pinjam," kata (Lisa, 2016). Studi oleh Brandsen dan Helderma, (2013), "Lembaga Keuangan Simpan Pinjam berperan cukup efektif dalam mensejahterakan dan membanggakan masyarakat kecil menjadi anggota Lembaga Keuangan Simpan Pinjam." Demikian pula, (Yildiz et al, 2015) mengemukakan hasil penelitian bahwa "keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di kota dan desa tempat Lembaga Keuangan Simpan Pinjam berbadan hukum atau bermarkas mencari perlindungan berupa Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang dicari Anggota masyarakat melalui keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang baik untuk tempat dan diharapkan mengikuti standar terkait dengan kebijakan dan peraturan yang jelas untuk dikelola, seperti ISO 26000 (Kholis et al., 2021).

ISO 26000 mengartikan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya

terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis (Chakroun et al., 2019). Kesesuaian dengan kemungkinan perkembangan dan kepentingan masyarakat. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan standar internasional, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini terintegrasi ke dalam semua fungsi organisasi dan dalam pengertian ini mencakup fungsi dan produk serta layanan (Chakroun et al., 2019).

Child et al., (2005) pemahaman yang menyeluruh tentang konsep, manfaat, praktik, dan persyaratan tata kelola perusahaan yang baik, dilanjutkan ke tahap implementasi Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. (Tripathy et al., 2021) Pengenalan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam kemudian menjadi pengelolaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang baik atau pengelolaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam/GGC yang baik. Pelaksanaan pengelolaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang baik, sebagai sebuah inovasi, memerlukan kemauan untuk mengubah cara berpikir, organisasi dan praktek organisasi masyarakat, yang dapat menjadi signifikan dibandingkan dengan keadaan saat ini. Perubahan yang diperlukan memiliki konsekuensi dan risiko nyata dan tidak berwujud saat mempertimbangkannya. Menerapkan manajemen Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang baik

mebutuhkan komitmen, proses dan waktu dan tidak dapat dilaksanakan dalam semalam atau sebagai "tanggapan acak" untuk peristiwa tertentu. Namun perubahan tata kelola simpan pinjam yang baik membawa hasil dengan keuntungan dan hasil yang dicapai (Tripathy et al., 2021).

Organisasi dikelola secara sehat untuk mencapai efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dicapai. Pelaksanaan tata kelola Spar- und Kreditanstalt diatur dengan mengatur unsur-unsur organisasi Spar- und Kreditanstalt sesuai dengan aturan dan kriteria tata kelola Spar- und Kreditanstalt (Dasuki dan Lestari, 2019). Khan, (2010) Berdasarkan konsep ISO 26000 Pelaksanaan tanggung jawab sosial didasarkan pada tujuh tema inti sesuai dengan standar pedoman tanggung jawab sosial: Tata Kelola Perusahaan, Hak Asasi Manusia, Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Adil, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Sosial. Partisipasi dan pengembangan masyarakat. (Hiller, 2013) Penerapan tujuh tema inti diharapkan membawa manfaat atau efek positif bagi pemangku kepentingan dan harus dikelola dan distandarisasi dengan baik.

Kalogiannidis (2020) Manajemen bank tabungan dan lembaga kredit untuk mempromosikan kelangsungan usaha dan

menyelenggarakan kursus pelatihan manajemen untuk bank tabungan dan lembaga kredit dan mengembangkan kursus pelatihan untuk manajer dan pengawas bawahan bank tabungan dan lembaga kredit. Peserta merasa mendapat informasi tentang isu-isu penting dan karenanya merasa terbantu untuk memahami sistem tata kelola perusahaan. Goell, (2018) Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta tentang pentingnya membangun manajemen masyarakat dan pengembangan bisnis meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat pada hasil eksternal, kemampuan peserta untuk merestrukturisasi tata kelola, dan manajemen baru agar Lembaga Keuangan Simpan Pinjam berhasil. Perera, (2008) Studi ini merupakan adaptasi dari pekerjaan sebelumnya dan berfokus pada tujuh bidang utama ISO 26000 tentang Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam yang terkait dengan tata kelola, hak asasi manusia, praktik perburuhan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, keterlibatan dan pengembangan. Kami hanya berurusan dengan topik komunitas Lembaga Keuangan simpan pinjam.

Shirado et al., (2013) Keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam memang menggembirakan secara kuantitatif, namun perlu perhatian yang lebih serius dari segi kualitas. Bauwens et

al., (2016) Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang menghambat perkembangan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam perlu diidentifikasi dan dicari alternatif pemecahannya. Sehingga dapat terus mengimplementasikan tujuan bersama di masa depan, yang memiliki kekhasan dan permasalahannya masing-masing. Nasila dan Akib (2014) Perhatian yang hati-hati dan bijaksana juga harus diberikan pada perbedaan karakteristik kearifan lokal bank tabungan dan lembaga kredit. Beberapa permasalahan yang ada pada Lembaga Keuangan Simpan Pinjam saat ini: (1) Kualitas sumber daya manusia. (2) Registrasi Pemangku Kepentingan. (3) Sistem pengawasan kelembagaan pada periode milenium. Guna membangun komunitas simpan pinjam, pemangku kepentingan memprioritaskan pengembangan dan peningkatan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam untuk memperkuat struktur ekonomi nasional (Bretos dan Marcuello, 2017).

Studi ini menguraikan semua pertanyaan kunci ini dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keadaan Sparkasse. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penerapan tujuh topik inti Sparkasse dengan topik yang dijelaskan dalam ISO 26000. Tantangan dari penelitian ini adalah untuk dapat menerapkan dan

mengimplementasikan tujuh tujuan inti ISO 26000, yang menyangkut manajemen organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik yang adil, masalah konsumen, dan partisipasi dan pengembangan masyarakat dalam Lembaga Keuangan Simpan Pinjam untuk tujuan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: "*Challenges and Strategies of Cooperatives in Implementing ISO 26000 for Sustainable Economic Development*".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Sustainable Economic Development***

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang sistematis sosial dan ekonomi, yang menjamin keberlanjutan tujuan tersebut, yaitubahwa pendapatan benar-benar meningkat, tingkat pendidikan meningkat, kesehatan masyarakat meningkat, kualitas hidup secara umum meningkat (Pearce et al., 1989). Suatu sistem ekonomi yang didalamnya terdapat jumlah penduduk dan jumlah barang dipertahankan pada tingkat tertentu. Kalimat ini adalah berkelanjutan secara ekologis dan memenuhi setidaknya kebutuhan dasar semua kelompok populasi" (Millar, 1994).

### ***Sustainable Development Goals (SDGs)***

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah agenda untuk mencapai

pembangunan berkelanjutan global dalam tiga dimensi Ekonomi, Masyarakat dan Lingkungan dan Rencana Aksi untuk Manusia, Planet, Kemakmuran dan Perdamaian Dunia. diimplementasikan dalam bentuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sasarannya terintegrasi, komprehensif, bersifat global, dapat diterapkan secara universal, dengan mempertimbangkan realitas negara-negara dengan kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda, dan mengoordinasikan kebijakan dan prioritas nasional. Peran negara sangat penting untuk menciptakan strategi yang komprehensif antara pembangunan sosial dan lingkungan, antara kekhususan dan prioritas nasional (PBB, 2015: 3, 14; Statistik Finlandia, 2016:3; Panul dan Fitri, 2016:11). Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dan 169 sub-tujuan yang berlaku dari tahun 2016 hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup berbagai tantangan dan tujuan pembangunan untuk mencapai setiap tujuan sepenuhnya. Ini adalah negara universal yang menawarkan peran yang seimbang untuk semua negara, baik negara maju, maju atau terbelakang, dan mampu memenuhi peran ini. Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus menguntungkan semua pemangku kepentingan. Tujuan SDGs teragkum antara lain (1) Tanpa



Kemiskinan, (2) Tanpa kelaparan, (3) Pendidikan Berkualitas, (4) Kehidupan sehat dan sejahtera, (5) Kesetaraan Gender, (6) Pendidikan berkualitas, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Berkurangnya Kesenjangan, (10) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (11) Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, (13) Penanganan perubahan iklim, (14) Ekosistem Lautan, (15) Ekosistem Daratan, (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

### **Lembaga Keuangan Simpan Pinjam**

Kegiatan utama Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam adalah memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggota Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang tidak memiliki nilai kredit yang tinggi dan yang mematuhi peraturan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Aktivitas Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam saat ini banyak yang tidak berkembang dan hanya mementingkan profit semata. Penelitian ini membahas tentang penerapan Implementasi ISO 26000 7 subyek inti ISO 26000 tentang *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues*, serta *community involvement and development*

pada Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam yang ada di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto dan membahas apasaja tantangan saat melakukan penerapan dan bagaimana strateginya apabila menemukan tantangan tersebut dan untuk bertujuan berkelanjutan pada Lembaga Keuangan Simpan Pinjam.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dalam good governance dilihat dari penerapan ISO 26000 serta isu dan strategi yang diterapkan. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah. Studi kualitatif dilakukan pada objek alami yang berkembang secara alami daripada dimanipulasi oleh peneliti, dan peneliti tidak benar-benar mempengaruhi dinamika objek tersebut.

Subyek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Responden survei adalah mewawancarai Direktur Lembaga keuangan dan Manager Operasional dan Manager Keuangan serta stakeholders di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis konten. Analisis Konten adalah metode untuk mempelajari

dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang terlihat. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner yang dibagikan kepada anggota dan pengurus yang menanggapi. Sedangkan data sekunder diambil dari Laporan Rapat Anggota Tahunan 2019.

Masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah masalah sosial dan dinamis. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari penelitian. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan cara wawancara dan observasi mendalam sehingga akan ditemukan pola yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bagian awal Pembahasan ini, dijelaskan tentang karakteristik informan. Informan yang dilibatkan dsedapat mungkin mewakili tema yang akan dibahas oleh peneliti. Informan dipilih juga dipertimbangkan dari segi jabatan, usia, status dan ruang lingkup tugas yang bersinggungan dengan ISO 26000. Selanjutnya, dibahas temuan yang berisi tentang factor-faktor yang menjadi hambatan / tantangan dalam menjalankan ISO 26000. Selanjutnya, dibahas strategi untuk menjalankan ISO 26000. Dan menganalisa bagaimana hasil temuan di

kaitkan dengan keberlanjutan pembangunan (SDGs) di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat hasil analisa diskriptif yang menghasilkan hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan ISO 26000 pada Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Sebagaimana ada 7 subyek Inti ISO 26000 yang belum optimal dilaksanakan dan ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan pada Subyek Inti Tata Kelola, lihat tabel 1.

Berdasarkan analisis deskriptif mengenai tantangan yang di dijalankan dalam melaksanakan ISO 26000 sebagai berikut :

1. Belum dijalankan SOP yang jelas sehingga dapat mengakibatkan error pada karyawan/pegawai dan dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Lembaga Keuangan simpan pinjam.
2. Belum menjalankan praktik operasi yang adil kepada sesama anggota koperasi dan masih terlihat kurang optimal nya pengawasan di Lembaga Keuangan simpan pinjam.
3. Belum mempunyai keputusan yang strategis untuk keberlangsungan koperasi simpan pinjam yang mengacu pada visi dan misi sehingga hanya mengandalkan keputusan dari monev untuk mengimplementasikan strategi

yang menyesuaikan kebutuhan yang dihadapi.

4. Permasalahan issue konsumen yang dihadapi masing masing Koperasi masih belum bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat begitu juga belum bisa memberikan win win solution bagi kedua belah pihak.
5. Tidak dilaksanakan tanggung jawab sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi sehingga banyak hambatan dalam setiap pelaksanaan usaha koperasi yang dijalankan, serta fungsi pengawasan masih lemah dan belum konsisten.

#### **Strategi mengatasi tantangan dalam penerapan Tata Kelola Manajemen berkaitan dengan hasil temuan penelitian**

Berdasarkan analisis deskriptif mengenai strategi yang di dijalankan dalam melaksanakan ISO 26000 sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan harus menjalankan SOP secara konsisten dan bertanggung jawab dengan cara bermusyawarah pada para anggota ataupun pemangku kepentingan lainnya guna untuk meningkatkan kinerja Lembaga Keuangan simpan pinjam dalam manajemen tata kelola.
2. Anggota Lembaga Keuangan simpan pinjam harus berpegang teguh pada prinsip prinsip praktik yang adil agar kinerja bisa berjalan dengan baik dan mencari karyawan yang memahami ketentuan yang baik mengenai koperasi.
3. Pemangku kepentingan harus menetapkan strategi jangka panjang untuk keberlangsungan Lembaga Keuangan simpan pinjam dengan adanya seperti itu maka terdapat target yang jelas dan tujuan yang jelas bagi karyawan dan pegawai dalam mencapai tujuan tersebut.
4. Merekrut karyawan yang mempunyai lulusan sarjana hukum agar bisa memberikan ketegasan sanksi/ *punishment* bagi konsumen yang bermasalah sehingga tidak mengganggu kinerja koperasi untuk kedepannya.
5. Merekrut karyawan yang professional dan memahami tentang tata kelola manajemen koperasi sehingga terciptanya tanggung jawab social yang selama ini menjadi tantang tersendiri pada Lembaga Keuangan simpan pinjam.

Tabel 1  
 Matriks Hasil Penelitian ISO 26000

Variabel Subyek Inti	Penerapan ISO 26000		Simpulan
	Lembaga Keuangan A	Lembaga Keuangan B	
Tata kelola	Belum menerapkan tata Kelola manajemen yang baik dan belum terstruktur	Belum melakukan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan koperasi	Kedua pihak Anggota Koperasi belum menjalankan tata kelola yang baik.
Hak Asasi Manusia	Sudah memberikan hak dan kewajiban yang sama tidak membedakan laki laki dan perempuan	Sudah melakukan pemberian Hak sebagai karyawan koperasi	Kedua koperasi sudah menjalankan dan menyesuaikan kesanggupan koperasi.
Praktik Perburuhan	Belum memberikan gaji sesuai dengan UMR	Belum mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan	Kedua koperasi belum melakukan praktik perburuhan yang berlaku.
Lingkungan	Sudah mendukung dengan daerah sekitar melalui program kebersihan kampung/desa	Sudah memberikan bantuan kepada daerah sekitar dengan peduli kebersihan. Dan memberikan tempat sampah di setiap RW nya.	Kedua pihak koperasi sama sama peduli dengan Lingkungan sekitar.
Praktik Operasi yang adil	Belum optimalnya fungsi pengawasan untuk pengelolaan koperasi	Belum bisa memilih nasabah dengan baik. Masih tebang pilih dalam pemilihan nasabah koperasi.	Kedua Anggota Koperasi belum melaksanakan yang sesuai bagaimana dengan semestinya.
Permasalahan Konsumen	Belum optimal dalam penyelesaian masalah nasabah yang punya dengan kredit macet.	Belum bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dalam koperasi, dan belum bisa memberikan win win solution bagi nasabah.	Kedua Anggota Koperasi belum bisa memberikan win win solution kepada konsumen yang terdapat masalah.
Keterlibatan dan pengembangan komunitas	Sudah memberikan dan membantu nasabah yang mempunyai komunitas untuk berkembang.	Sudah membantu nasabah dalam memperluas jaringan komunitas ukm nya agar tetap sustain.	Anggota Koperasi sudah mendukung keterlibatan komunitas dengan anggota koperasi sehingga bisa membuat jaringan yang luas.

### **Pembahasan Sustainable Economic Development**

Hasil temuan berkaitan dengan SDGs di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDG) sebagai agenda global untuk memajukan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 18 tujuan yang dapat dicapai, termasuk hidup tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan



dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengotorisasi Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dan keuangan mikro di daerah pedesaan atau kabupaten di mana sebagian besar pendapatannya rendah. Salah satu bentuk dukungan Pemprov Jatim untuk pengembangan usaha mikro adalah dengan memberikan pinjaman kepada keluarga yang membutuhkan modal usaha. Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang anggota dan pengurusnya adalah keluarga dengan UKM.

Keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di pedesaan dan daerah miskin a) mendorong kegiatan ekonomi di desa dan daerah tersebut, b) mendorong partisipasi keluarga miskin dalam pendidikan formal, c) memperkuat modal sosial penduduk pedesaan. Semua ini dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, beberapa warga desa tetap berhubungan dengan rentenir desa. Bank tabungan dan lembaga perkreditan desa memerlukan tambahan dukungan dan pengembangan secara kualitatif dan kuantitatif, agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat lebih tercapai secara menyeluruh. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pengelola Dana Simpan Pinjam terus membangun kepercayaan anggotanya

dalam pengelolaan agar berjalan dengan lancar.

## **KESIMPULAN**

Adanya tantangan dan strategi diharapkan Lembaga Keuangan simpan pinjam bisa melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (SDGs) seperti pada point 1 dan poin 8 dan poin 9 dan poin 17. SDGs No 1 tentang Pengentasan kemiskinan dengan mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan dan daerah tersebut untuk mengentaskan kemiskinan, SDGs No 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong partisipasi di kalangan keluarga berpenghasilan rendah untuk pekerjaan yang layak dan menumbuhkan perkonomian, SDGs No 9 tentang Berkurangnya Kesenjangan dengan Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan untuk bertujuan berkurangnya kesenjangan di masyarakat, SDGs No 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan memperkuat modal sosial penduduk pedesaan untuk kemitraan yang bisa menumbuhkan bisnis keluarga agar tujuan pertumbuhan ekonomi tercapai.

## **IMPLIKASI PENELITIAN**

Untuk meningkatkan kinerja inovasi, koperasi harus lebih proaktif dalam menanggapi berbagai isu terkait adanya perubahan lingkungan koperasi baik secara internal maupun eksternal. Perubahan

tersebut harus ditanggapi secara bijak melalui kegiatan research and development agar koeprasi dapat mempertahankan eksistensinya di kemudian hari. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan tata kelola dalam pelaksanaan ISO 26000. Untuk menjalankan tanggung jawab koperasi dalam hal Kelola manajemen, Koperasi harus menjadi lebih inovatif baik

dalam pengembangan produk, tata cara kerja yang lebih efektif dan efisien, utilisasi sumber daya yang terkontrol, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Adanya kepedulian yang tinggi pada tata Kelola manajemen, secara tidak langsung koperasi berinisiatif untuk melakukan perubahan melalui kegiatan inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bauwens, T., Gotchev, B., dan Holstenkamp, L. (2016). What drives the development of community energy in Europe? The case of wind power cooperatives. *Energy Research dan Social Science*, 13, 136-147.
- Battilana, J. (2018). Cracking the organizational challenge of pursuing joint social and financial goals: Social enterprise as a laboratory to understand hybrid organizing. *M@ n@ gement*, 21(4), 1278-1305.
- Birchall, J., dan Ketilson, L. H. (2009). Resilience of the cooperative business model in times of crisis. *International Labour Organisation*.
- Brandsen, T., dan Helderma, J. K. (2013). The conditions for successful co-production in housing: A case study of German housing cooperatives. In *New public governance, the third sector, and co-production* (pp. 187-209). Routledge
- Bretos, I., Errasti, A., dan Marcuello, C. (2020). Is there life after degeneration? The organizational life cycle of cooperatives under a 'grow-or-die'dichotomy. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 91(3), 435-458.
- Cabrera-Suárez, K., De Saá-Pérez, P., dan García-Almeida, D. (2001). The succession process from a resource-and knowledge-based view of the family firm. *Family business review*, 14(1), 37-48.
- Chakroun, S., Salhi, B., Amar, A. B., dan Jarboui, A. (2019). The impact of ISO 26000 social responsibility standard adoption on firm financial performance: Evidence from France. *Management Research Review*.
- Child, J., Faulkner, D., dan Tallman, S. B. (2005). *Cooperative strategy*. Oxford University Press, USA.
- Dasuki, R. E., dan Lestari, A. (2019). Implementation of Good Corporate Governance to the Value of Cooperative Company. *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)*, 2(1), 24-41.

- Goel, P. (2018). Implications of corporate governance on financial performance: an analytical review of governance and social reporting reforms in India. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 3(1), 1-21.
- Hamada, M. (2010). Commercialization of microfinance in Indonesia: The shortage of funds and the linkage program. *The Developing Economies*, 48(1), 156-176.
- Kalogiannidis, S. (2020). Economic cooperative models: agricultural cooperatives in Greece and the need to modernize their operation for the sustainable development of local societies. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(11), 452-468.
- Khan, H. U. Z. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management*, 52(2), 82-109
- Kholis, A., Syah, D. H., dan Lubis, S. (2021, February). The Research on the Model of SOE Corporate CSR Budget Management for Optimizing Disaster Management. In *International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)* (pp. 122-128). Atlantis Press
- Lisa, O. (2016). Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Luo, X., dan Shen, J. (2009). A study on inter-city cooperation in the Yangtze River Delta region, China. *Habitat International*, 33(1), 52-62.
- Mojo, D., Fischer, C., dan Degefa, T. (2017). The determinants and economic impacts of membership in coffee farmer cooperatives: recent evidence from rural Ethiopia. *Journal of Rural studies*, 50, 84-94
- Morck, R., dan Yeung, B. (2003). Agency problems in large family business groups. *Entrepreneurship theory and practice*, 27(4), 367-382.
- Nasila, J. W., dan Akib, H. (2014). Participative leadership of village head based local wisdom "H4" in district suwawa, bolango bone regency, gorontalo province Indonesia. *Global Journal of Business, Economics and Management*, 4(1).
- Özgül, S., Koçar, G., dan Eryaşar, A. (2020). The progress, challenges, and opportunities of renewable energy cooperatives in Turkey. *Energy for Sustainable Development*, 59, 107-119.
- Perera, O. (2008). How material is ISO 26000 social responsibility to small and medium-sized enterprises (SMEs)? . Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.
- Shirado, H., Fu, F., Fowler, J. H., dan Christakis, N. A. (2013). Quality versus quantity of social ties in experimental cooperative networks. *Nature communications*, 4(1), 1-8

- Suryanti, N., Wahjoedi, W., Utomo, S. H., dan Haryono, A. (2021). The learning model and the development of small medium enterprises in Indonesia. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 11(4), 138-147.
- Thomas, A. (2004). The rise of social cooperatives in Italy. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 15(3), 243-263.
- Tripathy, K. K., Paliwal, M., dan Nistala, N. (2021). Good governance practices and competitiveness in cooperatives: An analytical study of Kerala Primary Agricultural Credit Societies. *International Journal of Global Business and Competitiveness*, 16(2), 153-161
- Wahyuningtyas, R., Disastra, G., dan Rismayani, R. (2022). Toward cooperative competitiveness for community development in Economic Society 5.0. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*.
- Yildiz, Ö., Rommel, J., Debor, S., Holstenkamp, L., Mey, F., Müller, J. R., ... dan Rognli, J. (2015). Renewable energy cooperatives as gatekeepers or facilitators? Recent developments in Germany and a multidisciplinary research agenda. *Energy Research dan Social Science*, 6, 59-73.

